KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Soal Pembangunan Gedung Baru DPR: "Satu Sen Pun Harus Terbuka..."
Tanggal : Jumat, 06 November 2015
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Soal Pembangunan Gedung Baru DPR

"Satu Sen Pun Harus Terbuka..."

ANGGOTA DPR dari Fraksi PPP Syaifullah Tamliha meminta semua masyarakat ikut mengawasi proses pembangunan gedung baru DPR. Anggaran pembangunan gedung parlemen sebesar Rp 740 miliar rentan diselewengkan.

"Setiap satu sen dana yang dibelanjakan harus dipublikaskan secara transparan agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum," katanya kepada wartawan di Gedung DPR, kemarin.

Tamliha mengatakan, pengawasan penting dilakukan lantaran anggaran pembangunan gedung baru di Senayan itu berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2016.

"Diharapkan, seluruh LSM termasuk Jaksa dan KPK pasang mata dan telinga mengawasi jalannya pembangunan agar dapat dipertanggungjawabkan," cetusnya.



Syaifullah Tamliha

Dijelaskan, alasan disetujuinya pembangunan gedung baru DPR, karena kapasitas gedung DPR saat ini dianggap tidak memadai untuk menampung 560 anggota DPR beserta para staf khusus maupun umum.

"Dana ini bukan untuk alun-alun demokrasi tapi memang untuk pembangunan gedung baru," katanya.

Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yenny Soetrisno mengatakan, proses penganggaran pembangunan gedung baru DPR sejak awal tidak transparan. Salah satu contohnya, DPR sudah selesai menyelenggarakan sayembara desain gedung dan memutuskan pemenangnya pada Oktober lalu, padahal pengesahan anggaran baru terjadi pada akhir Oktober.

"Ada sayembara dan sudah menetapkan pemenang, ini sudah menyalahi aturan, karena pembahasan APBN belum disetujui. Proses ini seharusnya dilakukan setelah (ada) pembahasan, persetujuan, baru implementasi, baru memasang tender pengadaan barang dan jasa. Ini kan menyalahi aturan pengelolaan dan pengadaan barang dan jasa dalam APBN," kata Yenny. ■ QAR